

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P.6/Menhut-II/2012

Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2012 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Seluruh Wakil Pemerintah.

NO	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
I	Gubernur Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut dan pantai. 7. Pembinaan Kelembagaan RHL. 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi. 9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 15. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		16. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 17. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 18. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 19. Penyusunan NSDH Provinsi 20. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 21. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 22. Sosialisasi Pembangunan KPH 23. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 24. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 25. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Patroli pengamanan hutan 28. Pengamanan hutan 29. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 30. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 31. Pemadaman kebakaran hutan 32. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 34. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	
II	Gubernur Sumatra Utara	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi. 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat. 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Penyiapan Kelembagaan KPH 21. Sosialisasi Pembangunan KPH 22. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 23. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 24. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 25. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 28. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 29. Patroli pengamanan hutan 30. Pengamanan hutan 31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 32. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 33. Pemadaman kebakaran hutan 34. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 35. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 36. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	
III	Gubernur Sumatra Barat	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>15. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>16. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>17. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>20. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>21. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan</p> <p>22. Sinkronisasi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana-Rencana Kehutanan Daerah</p> <p>23. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR</p> <p>24. Penyiapan Kelembagaan KPH</p> <p>25. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>26. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>27. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>28. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>29. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>30. Patroli pengamanan hutan</p> <p>31. Pengamanan hutan</p> <p>32. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>33. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>34. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>35. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung</p> <p>36. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p> <p>37. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial</p>	
IV	Gubernur Riau	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi</p> <p>4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p> <p>6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>7. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Penyusunan NSDH Provinsi 21. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 22. Penyiapan Kelembagaan KPH 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 25. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 28. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 29. Patroli pengamanan hutan 30. Pengamanan hutan 31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 32. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 33. Pemadaman kebakaran hutan 34. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		35. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 36. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	
V	Gubernur Kepulauan Riau	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 5. Pembinaan Kelembagaan RHL 6. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 7. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 8. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 9. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 10. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 11. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 12. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 13. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 14. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 15. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 16. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 17. Penyiapan Kelembagaan KPH 18. Sosialisasi Pembangunan KPH 19. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		20. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 21. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 22. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 23. Patroli pengamanan hutan 24. Pengamanan hutan 25. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 26. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 27. Pemadaman kebakaran hutan	
VI	Gubernur Jambi	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 15. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 21. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 22. Penyiapan Kelembagaan KPH 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 25. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 28. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 29. Patroli pengamanan hutan 30. Pengamanan hutan 31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 32. Koordinasi pengendalian kebakaran	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		hutan 33. Pemadaman kebakaran hutan 34. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 35. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 36. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	
VII	Gubernur Sumatera Selatan	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Hutan Rakyat</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Fasilitas Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitas Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Penyiapan Kelembagaan KPH 21. Sosialisasi Pembangunan KPH 22. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 24. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Patroli pengamanan hutan 29. Pengamanan hutan 30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 32. Pemadaman kebakaran hutan 33. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 34. Fasilitas dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 35. Fasilitas dan koordinasi kawasan ekosistem esensial 	
VIII	Gubernur Kep.Bangka	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
	Belitung	<p>Tanaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 5. Pembinaan Kelembagaan RHL 6. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 7. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 8. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 9. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 12. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 13. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 14. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 15. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 16. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 17. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 18. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 19. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 20. Penyiapan Kelembagaan KPH 21. Sosialisasi Pembangunan KPH 22. Identifikasi dan Inventarisasi 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Permasalahan Kawasan Hutan 23. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 24. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 25. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Patroli pengamanan hutan 28. Pengamanan hutan 29. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 30. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 31. Pemadaman kebakaran hutan 32. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 34. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	
IX	Gubernur Bengkulu	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>7. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>21. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>22. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan</p> <p>23. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>24. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>25. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR</p> <p>26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>27. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>28. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>29. Patroli pengamanan hutan</p> <p>30. Pengamanan hutan</p> <p>31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>32. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>33. Pemadaman kebakaran hutan</p>	
X	Gubernur Lampung	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p> <p>5. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>6. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>7. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Hutan Rakyat 14. Fasilitas Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 15. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 16. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 17. Fasilitas Penyuluhan Kehutanan 18. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 19. Penyusunan NSDH Provinsi 20. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 21. Sosialisasi Pembangunan KPH 22. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 24. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Patroli pengamanan hutan 29. Pengamanan hutan 30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 32. Pemadaman kebakaran hutan	
XI	Gubernur Banten	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 3. Pembinaan, Pengawasan dan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Pengendalian Industri Primer Kehutanan 4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 5. Pembinaan Kelembagaan RHL 6. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 7. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 8. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 9. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 10. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 11. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 12. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 13. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 14. Penyusunan NSDH Provinsi 15. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 16. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 17. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 18. Patroli Pengamanan Hutan 19. Operasi Gabungan Peredaran Hasil Hutan 20. Koordinasi Pengamanan Hutan Lintas Propinsi 21. Penyelesaian kasus Hukum Pelanggaran/ Kejahatan Kehutanan 22. Patroli dan Pencegahan Karhut 23. Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan	
XII	Gubernur DKI Jakarta	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 2. Pembinaan, Pengendalian dan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>3. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>4. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>5. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>6. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>7. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>8. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>9. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>10. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan</p> <p>11. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>12. Operasi Pengamanan Hutan</p>	
XIII	Gubernur Jawa Barat	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p> <p>4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>5. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>6. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>7. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>8. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>9. Fasilitasi Penetapan dan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>10. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>11. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>12. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>13. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>14. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>15. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan</p> <p>16. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>17. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>18. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>19. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>20. Patroli pengamanan hutan</p> <p>21. Pengamanan hutan</p> <p>22. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>23. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>24. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>25. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung</p> <p>26. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p> <p>27. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial</p>	
XIV	Gubernur Jawa Tengah	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>5. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>6. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>7. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>8. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>9. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>10. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>11. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>12. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>13. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>14. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>15. Sinkronisasi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana-Rencana Kehutanan Daerah</p> <p>16. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>15. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>16. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>17. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>18. Patroli pengamanan hutan</p> <p>19. Pengamanan hutan</p> <p>20. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		21. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 22. Pemadaman kebakaran hutan 23. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 24. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 25. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	
XV	Gubernur DI Yogyakarta	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 4. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 5. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 6. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 7. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 8. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 9. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 10. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 11. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 12. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 13. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 14. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 15. Penyiapan Kelembagaan KPH 16. Sosialisasi Pembangunan KPH 17. Identifikasi dan Inventarisasi	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Permasalahan Kawasa Hutan 18. Penanganan konflik dan Tekanan Pada Kawasan TN dan KK Lainnya 19. Kegiatan Bidang Penyidikan dan Perlindungan Hutan 20. Penanganan Kasus Kejahatan Kebakaran Hutan di Provinsi 21. Diklat Teknis Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan 22. Pembinaan dan Pemantauan Pencegahan Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan	
XVI	Gubernur Jawa Timur	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 5. Pembinaan Kelembagaan RHL 6. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 7. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 8. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 9. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 10. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan 11. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 12. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		13. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 14. Penyusunan NSDH Provinsi 15. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 16. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 17. Singkronisasi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana-Rencana Kehutanan Daerah 18. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 19. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 20. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 21. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 22. Patroli pengamanan hutan 23. Pengamanan hutan 24. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 25. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 26. Pemadaman kebakaran hutan	
XVII	Gubernur Bali	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 5. Supervisi Dalam Rangka Inventarisasi Tegakan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 11. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 12. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 13. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 14. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 15. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 16. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 17. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 18. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 19. Sosialisasi Pembangunan KPH 20. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 21. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 22. Supervisi dalam rangka inventarisasi tegakan 23. Operasi Pengamanan Hutan 24. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 25. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 26. Pemadaman kebakaran hutan	

NO	Ururan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
XVIII	Gubernur Nusa Tenggara Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 5. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 6. Pembinaan Kelembagaan RHL 7. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 11. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 12. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 13. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 14. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 15. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 16. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 17. Penyusunan NSDH Provinsi 18. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 19. Fasilitasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		20. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 21. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 22. Penyiapan Kelembagaan KPH 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 25. Sinkronisasi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana-Rencana Kehutanan Daerah 26. Penyelesaian Kasus hukum/ Pelanggaran/Kejahatan Kehutanan 27. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan 28. Koordinasi dan operasi pengamanan Hutan 29. Operasi Fungsional pengamanan hutan 30. Pemberksan dan Pengangkutan Barang Bukti 25. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 26. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 27. Pemadaman kebakaran hutan	
XIX	Gubernur Nusa Tenggara Timur	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 5. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 6. Pembinaan Kelembagaan RHL	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		7. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 15. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 16. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 17. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 18. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 19. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 20. Penyiapan Kelembagaan KPH 21. Sosialisasi Pembangunan KPH 22. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 24. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 25. Operasi Pengamanan Hutan Terpadu Lintas Wilayah	
XX	Gubernur Kalimantan Barat	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Pengelolaan Hutan Produksi</p> <p>4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p> <p>6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>7. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan</p> <p>21. Penyiapan Kelembagaan KPH</p> <p>22. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>23. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>24. Pembinaan Pengukuran dan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Pemetaan Penyiapan Areal HTR</p> <p>25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>26. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>28. Patroli pengamanan hutan</p> <p>29. Pengamanan hutan</p> <p>30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>32. Pemadaman kebakaran hutan</p>	
XXI	Gubernur Kalimantan Tengah	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi</p> <p>4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p> <p>6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>7. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>dan sosialisasi</p> <p>10. Fasilitas Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>12. Fasilitas Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>14. Fasilitas Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>15. Fasilitas Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Fasilitas Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>21. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan</p> <p>22. Penyiapan Kelembagaan KPH</p> <p>23. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>24. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR</p> <p>25. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>26. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>27. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>28. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>29. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>30. Patroli pengamanan hutan</p> <p>31. Pengamanan hutan</p> <p>32. Sosialisasi pengendalian kebakaran</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		hutan 33. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 34. Pemadaman kebakaran hutan	
XXII	Gubernur Kalimantan Selatan	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR</p> <p>21. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>22. Penyiapan Kelembagaan KPH</p> <p>23. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>24. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>26. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>28. Patroli pengamanan hutan</p> <p>29. Pengamanan hutan</p> <p>30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>32. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>33. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung</p> <p>34. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p> <p>35. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial</p>	
XXIII	Gubernur Kalimantan Timur	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		21. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 22. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 23. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 24. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 25. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Patroli pengamanan hutan 28. Pengamanan hutan 29. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 30. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 31. Pemadaman kebakaran hutan 32. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 34. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	
XXIV	Gubernur Sulawesi Utara	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer	

NO	Ururan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Kehutanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 21. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 22. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 23. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 24. Sosialisasi Pembangunan KPH 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Peningkatan kapasitas sumberdaya 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>28. Patroli pengamanan hutan</p> <p>29. Pengamanan hutan</p> <p>30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>32. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>33. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung</p> <p>34. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p> <p>35. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial</p>	
XXV	Gubernur Sulawesi Tenggara	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi</p> <p>4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p> <p>6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>7. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>21. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>22. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan</p> <p>23. Penyiapan Kelembagaan KPH</p> <p>24. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>25. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>26. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR</p> <p>27. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>28. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>29. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>30. Patroli pengamanan hutan</p>	

NO	Ururan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		31. Pengamanan hutan 32. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 33. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 34. Pemadaman kebakaran hutan 35. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 36. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 37. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	
XXVI	Gubernur Sulawesi Tengah	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		12. Fasilitas Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitas Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitas Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitas Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Penyiapan Kelembagaan KPH 21. Sosialisasi Pembangunan KPH 22. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 23. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 24. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Patroli pengamanan hutan 29. Pengamanan hutan 30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 32. Pemadaman kebakaran hutan 33. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 34. Fasilitas dan koordinasi pengelolaan hutan lindung	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		35. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	
XXVII	Gubernur Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan</p> <p>21. Penyiapan Kelembagaan KPH</p> <p>22. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>23. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>24. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR</p> <p>25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>26. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>28. Patroli pengamanan hutan</p> <p>29. Pengamanan hutan</p> <p>30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>32. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>33. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung</p> <p>34. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p> <p>35. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial</p>	
XXVIII	Gubernur Sulawesi Barat	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi</p> <p>4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p> <p>6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>7. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>21. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan</p> <p>22. Penyiapan Kelembagaan KPH</p> <p>23. Identifikasi dan Inventarisasi</p>	

NO	Ururan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Permasalahan Kawasan Hutan 24. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Patroli pengamanan hutan 29. Pengamanan hutan 30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 32. Pemadaman kebakaran hutan	
XXIX	Gubernur Gorontalo	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Penyiapan Kelembagaan KPH 21. Sosialisasi Pembangunan KPH 22. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 23. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 24. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 25. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Patroli pengamanan hutan 28. Pengamanan hutan	
XXX	Gubernur	1. Pembinaan, Pengawasan dan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
	Maluku	<p>Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi</p> <p>4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p> <p>6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>7. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>12. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>13. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>14. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>15. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>16. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>17. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		19. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 20. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 21. Penyiapan Kelembagaan KPH 22. Sosialisasi Pembangunan KPH 23. Identifikasi dan Inventarsasi Permasalahan Kawasan Hutan 24. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 25. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Patroli pengamanan hutan 28. Pengamanan hutan	
XXXI	Gubernur Maluku Utara	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu	

NO	Ururan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>dan sosialisasi</p> <p>10. Fasilitas Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>12. Fasilitas Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>14. Fasilitas Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>15. Fasilitas Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Fasilitas Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>21. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>22. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>23. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>24. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR</p> <p>25. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan</p> <p>26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>27. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>28. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>29. Patroli pengamanan hutan</p> <p>30. Pengamanan hutan</p> <p>31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>32. Koordinasi pengendalian kebakaran</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		hutan 33. Pemadaman kebakaran hutan	
XXXII	Gubernur Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 11. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 12. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 13. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 14. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 15. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 16. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 17. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan 18. Penyiapan Kelembagaan KPH 19. Sosialisasi Pembangunan KPH 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		20. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 21. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR 22. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 23. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 24. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 25. Patroli pengamanan hutan 26. Pengamanan hutan 27. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 28. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 29. Pemadaman kebakaran hutan 30. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 31. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 32. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	
XXXIII	Gubernur Papua Barat	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>7. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>9. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>10. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>11. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>12. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>13. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>14. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>15. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>16. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan</p> <p>17. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>18. Pembinaan Pengukuran dan Pemetaan Penyiapan Areal HTR</p> <p>19. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>18. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>19. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>20. Patroli pengamanan hutan</p> <p>21. Pengamanan hutan</p> <p>22. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>23. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>24. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>25. Penyusunan rancangan pengelolaan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		hutan lindung 26. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 27. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN